

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Indonesia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendidikan di Indonesia termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan rata-rata 0.3243. Selain itu, tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Indonesia juga masih rendah dengan rata-rata 8.073 tahun, yang berarti rata-rata penduduk di Indonesia masih belum tuntas melaksanakan wajib belajar 9 tahun.
2. Variabel-variabel yang digunakan untuk menjelaskan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia adalah Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan *Gender Gap* Pendidikan.
3. Hasil estimasi model untuk variabel Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan *Gender Gap* Pendidikan secara parsial untuk ketiganya mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendidikan dengan taraf  $\alpha = 5\%$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa tingkat Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan *Gender Gap* Pendidikan berhubungan positif terhadap Ketimpangan Pendidikan.

4. Hasil estimasi model untuk variabel Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan *Gender Gap* Pendidikan secara simultan berpengaruh negatif terhadap



Ketimpangan Pendidikan. Hal ini berarti jika ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan *gender gap* pendidikan bernilai 0 maka ketimpangan pendidikan akan menurun.

5. Dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada hasil estimasi model (Data Panel) dari variabel Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan *Gender Gap* Pendidikan mampu menjelaskan variabel Ketimpangan Pendidikan di Indonesia sebesar 0.956396 atau 95,64%. Sedangkan sisanya 0.0436 atau 4,36% Ketimpangan Pendidikan di Indonesia dipengaruhi variabel lainnya yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Masih belum terlaksananya program wajib belajar 9 tahun di Indonesia, yang dilihat dari rata-rata lama sekolah di setiap provinsi pada tahun 2018 hanya 8 dari 34 provinsi yang sudah mampu menerapkan program ini. Diharapkan pemerintah pusat lebih memperhatikan kualitas pendidikan, sarana prasarana atau membuat dana khusus terutama bagi daerah-daerah yang jauh tertinggal seperti provinsi Papua yang rata-rata penduduknya hanya tamat SD. Selain itu, pemerintah pusat juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan keberhasilan program ini.

2. Sesuai dengan hasil analisis penelitian ini, disarankan kepada pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi-provinsi di Indonesia agar membuat kebijakan yang dapat mengatur dan mengelola pendidikan supaya terdistribusi secara merata terutama dalam mengatur tingkat pemerataan pendapatan, kemiskinan dan *gender gap* pendidikan. Hal ini dikarenakan ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan *gender gap* pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendidikan.
3. Pemerataan pembangunan harus lebih diprioritaskan pada wilayah yang tertinggal, mengingat masih kurangnya infrastruktur ekonomi yang mendukung pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antara golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Karena pendapatan masyarakat yang semakin merata mampu menurunkan ketimpangan pendidikan. Terutama bagi provinsi-provinsi yang memiliki ketimpangan tertinggi seperti provinsi DKI Jakarta agar dapat membuat kebijakan dalam pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat dengan cara membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang berdampak langsung oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti peningkatan UMKM yang bertaraf online, mendorong anak-anak muda untuk berwirausaha terutama anak-anak muda dari ekonomi menengah kebawah dengan membuat program bunga rendah atau 0% untuk anak-anak muda berwirausaha sekaligus membuat program bimbingan usaha untuk anak-anak muda dalam berwirausaha. Dengan lebih kreatifnya

masyarakat menengah kebawah akan mendorong peningkatan penghasilan rumah tangga yang berakibat penurunan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta dan daerah-daerah yang memiliki ketimpangan pendapatan tinggi. Dengan semakin meratanya pendapatan di kalangan masyarakat, diharapkan pendidikan akan semakin meningkat dan lebih berkualitas.

4. Kebijakan penurunan kemiskinan wajib dilakukan dengan cara memberikan akses penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin, akses modal, pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. Terutama, untuk masyarakat miskin di provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo yang merupakan 5 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kebijakan lainnya yang dapat diambil pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan biaya sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, bukan hanya biaya pendidikan tetapi biaya seragam sekolah, biaya alat tulis dan biaya ongkos ke sekolah. Selain itu, pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah harus melibatkan warga miskin sebagai tenaga pekerja dalam investasi infrastruktur yang saat ini sedang menjadi fokus pemerintah. Dengan penurunan angka kemiskinan diharapkan terjadi penurunan ketimpangan pendidikan karena warga miskin sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan dapat menyisihkan uangnya untuk investasi di bidang pendidikan (*human capital*).

5. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat, khususnya masyarakat yang tertinggal agar tidak adanya perbedaan pemberian pendidikan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Terutama untuk provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Agar *Gender Gap* Pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan menurun. Dengan menurunnya *Gender Gap* pendidikan ini akan menurunkan ketimpangan pendidikan.
6. Perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel lain yang tidak diteliti, terutama tentang akses penduduk miskin dalam mendapatkan pendidikan. Selain itu, ukuran ketimpangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien gini pendidikan. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran ketimpangan lainnya seperti indeks theil pendidikan maupun indeks atkinson.